

ANALISIS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KELURAHAN TANJUNGPINANG KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015

Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri., M.Si & Alona Dwinata., M.Si

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Tanjungpinang

ABSTRAK

Partisipasi politik adalah merupakan salah satu wujud dari sebuah proses demokrasi. Hal ini dapat kita lihat di dalam pelaksanaan pemilihan umum seperti pemilihan umum kepala daerah. Sukses tidaknya pelaksanaan dari sebuah demokrasi dapat diukur dari tinggi rendahnya partisipasi politik dari masyarakat. Namun belakangan ini partisipasi dari masyarakat cenderung turun dapat dilihat dari angka golput yang tinggi seperti yang terjadi pada pemilihan umum kepala daerah Kota Tanjungpinang di Tahun 2012. Tepatnya di Kelurahan Tanjungpinang Kota yang angka golputnya tertinggi se Kota Tanjungpinang yaitu mencapai 51,4%. Ternyata hal yang terjadi pada pemilu walikota tahun 2012 lalu juga terjadi pada pemilu gubernur kepulauan riau tahun 2015 lalu yaitu 38,3%. Perubahan sistem pemilihan yang tadinya dilaksanakan serentak dan sekarang serentak ternyata tidak mempengaruhi tingginya angka golput. Untuk itu dalam tulisan ini akan dibahas factor-faktor apa yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat khususnya masyarakat kelurahan tanjungpinang kota.

Keywords : Partisipasi politik, Pemilihan umum kepala daerah

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, dimana masyarakat atau warga negaranya diberikan hak untuk memilih pemimpinnya masing-masing. Mulai dari pemilihan presiden sampai dengan pemilihan kepala desa semuanya dilakukan secara langsung dan berjalan demokratis. Proses demokratisasi hanya mungkin jika demokrasi berakar kuat pada tingkat lokal. Demokratisasi pada tingkat nasional akan terbangun apabila demokrasi juga berlangsung pada tingkat

lokal. Tanpa pemberdayaan demokrasi pada tingkat lokal, maka kerangka demokrasi pada tingkat nasional akan rapuh. Dalam proses ini, perlu pembelajaran politik yang efektif yang dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, sehingga masyarakat lokal benar-benar mengambil keputusan tentang berbagai hal menyangkut kepentingan masyarakat termasuk dalam memilih pemimpinnya.

Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah proses demokratisasi karena merupakan pembelajaran politik yang relevan dan merupakan upaya memperkuat sistem lokal dan otonomi daerah sebagai suatu proses demokratisasi. Proses pemilihan akan memberi peluang lebih besar pada setiap orang untuk berpartisipasi, juga memperluas akses masyarakat lokal untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Pemilihan kepala daerah langsung juga dinilai banyak pihak akan lebih menjamin legitimasi pemerintah daerah yang lebih kuat, karena pemilihan langsung akan menutup peluang bagi pencalonan kepala daerah yang tidak diinginkan masyarakat lokal dan lebih menjamin akuntabilitas pemerintah daerah.

Akhir-Akhir ini pemilihan umum kepala daerah menjadi perhatian umum, hal ini berkenaan dengan pemilihan umum kepala daerah yang akan dilaksanakan secara serentak. Setelah UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah disahkan maka pemilihan umum kepala daerah akan dilaksanakan dengan tujuh gelombang yaitu mulai dari Tahun 2015 hingga tercapai pemilukada serentak secara nasional di tahun 2027.(www.kpu.go.id)

Adapun tujuan utama pemerintah melaksanakan pemilukada serentak adalah demi efisiensi anggaran. Ada beberapa hal baru yang ada dalam sistem

pemilihan kepala daerah jika kita melihat dan mengacu dari PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) yang telah disahkan oleh pemerintah, antara lain: **Pertama**, dari aspek tanggungjawab penyelenggaraan, pilkada serentak menjadi tanggungjawab bersama KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. **Kedua**, dari aspek pembiayaan, untuk empat aktivitas kampanye, yaitu debat antar kandidat, penyediaan bahan kampanye, alat peraga kampanye dan iklan di media massa cetak dan elektronik menjadi beban APBD. **Ketiga**, dari aspek pencalonan, sekarang tidak boleh lagi turun kasta. Gubernur tidak boleh jadi calon Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Wali Kota. Wakil Gubernur tidak boleh menjadi calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Wali Kota.

Selain itu calon tidak boleh punya konflik kepentingan dengan pertahanan. Artinya tidak boleh memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, dan atau garis keturunan kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan. **Keempat**, untuk penetapan calon terpilih berubah dari sistem bersyarat minimal menjadi sistem simple majority artinya pasangan calon yang memperoleh suaran terbanyak langsung ditetapkan sebagai pemenang sehingga tidak dikenal lagi istilah putaran kedua. Dari keempat hal baru tersebut tentunya akan menciptakan euforia politik di kalangan masyarakat.

Pemerintah berencana akan memulai tahap pertama pemilihan umum di Tahun 2015 ini. Ada 269 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak di tahun 2015 ini salah satunya adalah yang akan diselenggarakan di Provinsi Kepulauan Riau. Dari 7 Kabupaten/Kota yang ada di Kepulauan Riau 3 Kabupaten/Kota akan menyelenggarakan Pilkada (Pemilihan kepala daerah), yaitu Pilkada Kabupaten Bintan, Pilkada Kabupaten Anambas, dan Pilkada kabupaten Lingga serta di tambah dengan Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Pemilihan umum kepala daerah ini akan dilaksanakan hanya

tinggal hitungan bulan. Pada saat ini rata-rata partai mulai berlomba melakukan lobi-lobi politik untuk mengusung nama calon kepala daerah.

Namun demikian proses politik ini di rusak oleh merebaknya pesimisme dan apatisme masyarakat yang selanjutnya menurunkan partisipasi politik masyarakat seperti yang pernah terjadi pada pemilihan umum kepala daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 yang lalu, dimana angka golput mencapai angka 42 % seperti yang terlihat pada Table 1 dibawah ini. Dimana dapat dilihat pada tabel bahwa Kecamatan Tanjungpinang Kota merupakan Kecamatan dengan angka golput tertinggi, dan di Tabel 2 dapat dilihat bahwa Kelurahan Tanjungpinang Kota merupakan kelurahan yang penduduknya paling banyak tidak ikut memilih atau golput.

Table 1. Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota KotaTanjungpinang Tahun 2012

No.	Data Pemilih	Kel.TPI Kota	Kel. Kp Bugis	Kel. Senggarang	Kel. Peyengat	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	DPT	6052	6159	3035	1872	17118
2	Jumlah Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih	2939	3439	2004	1281	9663
3	Jumlah Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih	3113	2720	1031	591	7455
Persentase Golput		51,44 %	44,16%	33,97%	31,57%	

Sumber : KPU Kota Tanjungpinang, 2012

Table 2. Data Jumlah Golput Di Kecamatan Tanjungpinang Kota Tahun 2012

No.	Data Pemilih	Kec.Tpi Barat	Kec.Tpi Kota	Kec.Tpi Timur	Kec.Bukit Bestari	Jumlah
1	DPT	41.371	17.118	51.683	43.309	153.481
2	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih	23.298	9.589	29.643	24.515	87.045
3	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	18.073	7.529	22.04	18.794	66.436
	Persentase golput	43,96%	43,98%	42,64%	43,39%	

Sumber : KPU Kota Tanjungpinang, 2012

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa Kelurahan Tanjungpinang Kota merupakan kelurahan yang memiliki angka golput tertinggi dibandingkan kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Tanjungpinang Kota. Sedangkan pada pemilihan umum gubernur kepulauan riau tahun 2015 yang lalu didapatkan hasil seperti pada tabel 3 dibawah ini.

Table 3. Jumlah pemilih dan jumlah yang menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih di kelurahan Tanjungpinang Kota pada Pilgub 2015

Lokasi	Jumlah DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih	Presentase Pemilih
1	2	3	4	5
Kelurahan Tanjungpinang Kota	5.371	2.059	3.312	38,3%
1	2	3	4	5
Kelurahan Kampung Bugis	5.911	3.302	2.609	55,8%
Senggarang	2.943	1.707	1.236	58%
Penyengat	1.808	1.261	547	69,7%

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, 2015

Selain itu Kelurahan Tanjungpinang Kota juga ditempati oleh mayoritas etnis Tionghoa yang tentu saja memiliki sejarah yang kelam di Indonesia yang mengakibatkan mereka masih trauma untuk terlibat di dalam politik. Tingginya angka golongan putih atau golput pada beberapa pilkada di beberapa daerah seperti yang terjadi dikota Tanjungpinang ini dapat dijadikan sinyal awal akan adanya skeptisme dan apatisme.

Keengganan masyarakat ini bukan tanpa dasar, keterlibatan para pimpinan politik yang juga menjadi wakil rakyat dalam tindak pidana korupsi yang disertai dengan demoralisasi perilaku. Untuk menutupi kekurangan mereka terus mencoba meyakinkan rakyat agar tetap memilih pada pemilu yang akan datang, para politisi mencoba membangun citra hampa dengan mengumbar retorika politik di media masa dan juga spanduk-spanduk yang menambah kesemrawutan lingkungan.

Atas dasar beberapa fenomena diatas peneliti tertarik untuk melihat bagaimana partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Kota Tanjungpinang dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, dengan judul penelitian “ Analisis Partisipasi politik masyarakat kelurahan tanjungpinang kota dalam pemilihan gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) Serentak

Pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia dimulai pada tahun 2005, tepatnya pada bula juni 2005. Pemilukada merupakan salah satu upaya untuk menciptakan kondisi pemerintahan yang demokratis karena : Pertama, metode ini mendekatkan pemerintah daerah dengan rakyat di wilayahnya. Kedua, akan membantu rakyat membangun rasionalitas sebagai pemilih. Dengan kata lain akan mengerti pentingnya proses politik daerah, mengetahui

hak dan kewajibannya sebagai warga daerah untuk memilih tokoh politik yang handal, dan mengekspresikan kepentingan mereka sebagai warga daerah. Ketiga, pemerintah daerah akan lebih akuntabel kepada rakyat. Keempat, Pemerintah daerah akan memberikan pelayanan public sesuai dengan kepentingan warganya dan transparan dalam mempergunakan keuangan negara.(Notrida,29 : 2007)

Sebagaimana dikatakan Tip O'Neill, " All politics is local", yang berarti bahwa demokrasi akan berkembang subur dan terbangun kuat di aras nasional apabila di tingkatan yang lebih rendah nilai-nilai demokrasi berakar kuat. Pilkada langsung akan mewujudkan makna tersebut (Legowo, 2005). Dengan pemahaman seperti itu maka penyelenggaraan Pilkada langsung dipandang dapat memberikan dampak positif terhadap penguatan demokrasi di Indonesia. Selain itu menurut Lili (2007: 331) dengan Pilkada langsung akan dapat mencegah konsentrasi kekuasaan karena center kekuasaan tidak lagi di pusat tetapi di daerah-daerah. Distribusi Kekuasaan, kesetaraan politik dan partisipasi politik akan mengurangi kemungkinan konsentrasi kekuasaan.

Namun dalam pelaksanaannya Pemilihan umum kepala daerah terdapat beberapa masalah yang muncul seperti yang dijelaskan oleh Tim Peneliti Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan demokrasi) dalam Buku Pilkada (2011: 4-5) yaitu pertama, masalah pencalonan. Kedua, masalah pemungutan dan penghitungan suara. Ketiga, penetapan calon terpilih. Keempat, masalah penegakan dan penyelesaian hukum. Kelima, masalah pelaporan dana kampanye dan masalah-masalah lainnya. Akibat banyaknya permasalahan yang terjadi seperti yang telah dijelaskan diatas membuat pemerintah beberapa kali mengganti peraturan yang berkaitan dengan pemilihan umum kepala daerah seperti yang dappat dilihat pada tabel 4 Dibawah ini.

Tabel 4 Perbandingan Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah

UU Nomor 32 tahun 2004	UU Nomor 22 tahun 2014	UU Nomor 1 tahun 2015 (Perppu Nomor 1 tahun 2014)	UU Perubahan UU Nomor 1 tahun 2015
1	2	3	4
Calon Kepala Daerah diajukan dan dipilih Secara paket/ berpasangan dengan calon wakil kepala daerah.	Hanya calon kepala daerah yang diajukan dan dipilih. Adapun wakil kepala daerah dipilih oleh kepala daerah terpilih.	Hanya calon kepala daerah yang diajukan dan dipilih. Adapun wakil kepala daerah dipilih oleh kepala daerah terpilih.	
Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.	Gubernur dipilih oleh DPRD Provinsi. Bupati dipilih oleh DPRD Kabupaten. Walikota diilih oleh DPRD Kota.	Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat	
Pilkada tak serentak	Pilkada serentak 5 tahun sekali. Sebelum pelaksanaan pilkada serentak nasional 2020, dilaksanakan pilkada serentak dua gelombang yakni 2015 dan 2018.	Pilkada serentak 5 tahun sekali dengan pilkada serentak nasional 2020. Sebelum serentak nasional 2020, diatur Pilkada serentak dua gelombang yakni 2015 dan 2018.	Pilkada serentak 5 tahun sekali dengan pilkada serentak nasional 2027. Sebelum serentak nasional 2027 diatur pilkada serentak enam gelombang, yakni desember 2015, februari 2017, juni 2018, tahun 2020,2022 dan 2023
Tak ada syarat uji Public	Calon kepala daerah wajib mengikuti uji public.	Calon kepala daerah wajib mengikuti uji publik	Tak ada syarat uji publik

1	2	3	4
Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki minimal 15 persen kursi di DPRD atau minimal 15 persen suara sah dalam pemilihan umum DPRD	Calon kepala daerah diajukan fraksi atau gabungan fraksi yang memiliki minimal 20 kursi DPRD atau memperoleh 25 persen suara sah dalam pemilu legislative di tingkat daerah	Calon kepala daerah diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki minimal 20 persen kursi DPRD atau memperoleh minimal 25 persen suara sah dalam pemilu DPRD.	Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki minimal 20 persen kursi DPRD atau memperoleh minimal 25 persen suara sah dalam pemilu DPRD
Pemenang pilkada adalah pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50 persen suara sah. Jika tidak ada yang memperoleh suara diatas 50 persen, pasangan calon yang memperoleh suara minimal 25 persen, diselenggarakan pemilihan putaran kedua.	Pemenangan pilkada adalah calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak	Pemenang pilkada adalah calon kepala daerah yang memperoleh minimal 30 persen suara sah. Jika tidak ada calon yang memperoleh suara minimal 30 persen, diselenggarakan pilkada putaran kedua	Pemenang pilkada adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak
Sengketa hasil pilkada ditangani oleh mahkamah konstitusi.	Tak ada penanganan sengketa hasil karena pemilihan oleh DPRD	Sengketa hasil Pemilihan diselesaikan oleh pengadilan tinggi yang ditunjuk mahkamah agung	Sengketa hasil pemilihan diselesaikan oleh badan peradilan khusus. Sebelum Peradilan khusus terbentuk, sengketa hasil pemilihan ditangani oleh MK

Sumber : Harian Kompas, 14 Maret 2015

2. Tipologi Partisipasi Politik

Secara umum menurut A.Rahman (2007 : 288) tipologi partisipasi politik sebagai kegiatan dibedakan menjadi :

1. Partisipasi Aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya setiap warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan public mengajukan alternative kebijakan public yang berlainan dengan kebjakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain-lain.
2. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
3. Golongan putih (Golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang dicita-citakan.

Adapun menurut Eep Saefullah Fatah (Arianto, 2011 :54) ada beberapa sebab orang untuk tidak memilih (golput), diantaranya adalah :

- a. Golput teknis, hal ini dikarenakan sifat teknis tertentu (seperti keluarga meninggal.ketiduran,dan lain-lain) berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara karena sakit, keluar kota, bekerja, dan cuaca buruk.
- b. Golput politis, hal ini untuk masyarakat yang tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau pesimistis bahwa pemilu/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan, serta tidak ada sosialisasi tentang visi dan misi kandidat sehingga pemilih tidak memahami isi, visi dan misi kandidat.
- c. Golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistic,penyelenggara pemilu),tidak mendapat undangan, tidak ada sosialisasi tentang pelaksanaan pemilu, dan tidak tahu jika dapat menggunakan KTP untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih.

- d. Golput ideologis, yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat didalamnya entah karena alasan nilai-nilai agama atau pandangan yang berbeda.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Untuk menggambarkan partisipasi politik di Indonesia dapat dilihat dari konsep model pembangunan teknokratis yang bercirikan partisipasi politik yang rendah, penanaman modal dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Model ini mengasumsikan bahwa partisipasi politik perlu ditekan untuk dapat menggairahkan ekonomi. Usaha pemerintah untuk menindas partisipasi politik tersebut akhirnya akan menciptakan tekanan dan ketegangan yang pada akhirnya akan membawa suatu "ledakan partisipasi", yang mungkin saja menggulingkan sistem politik yang ada. (Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, 1990 :32)

Model diatas setidaknya dapat menggambarkan tentang keadaan politik di Indonesia sejak zaman orde baru yang cenderung menekan partisipasi politik masyarakat yang akhirnya menimbulkan ledakan partisipasi melalui gerakan reformasi. Hal ini juga terjadi pada masyarakat etnis tionghoa yang semasa orde baru tidak mendapatkan kesempatan sedikitpun untuk terlibat dalam dunia politik. Sehingga wajar jika pada masa reformasi ini mereka mengekspresikan kebebasan politik melalui ikut serta dalam lembaga serta kegiatan-kegiatan politik yang ada.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang yaitu kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik), menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik. Selain itu, faktor yang berdiri sendiri (bukan variabel independen). Artinya tinggi rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain, seperti status sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi. Adapun yang dimaksud status sosial adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan, pekerjaan dan lain-lain-lain. Yang dimaksud status ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Hal ini diketahui dari pendapatan, pengeluaran, ataupun pemilikan benda-benda berharga. Seseorang memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik serta sikap dan kepercayaan terhadap pemerintah (Surbakti, 2007 :145).

Dalam pelaksanaan Pilkada beberapa tahun terakhir ini, media massa di Indonesia juga diharapkan memiliki peran cukup besar terhadap political empowerment terhadap warga negara di berbagai daerah. Pers diharapkan bukan hanya menyukseskan dengan menyebarkan electorate information tentang bagaimana cara memberikan suara dalam Pilkada. Tetapi juga dituntut melalui pemberitaannya melakukan voters education, pendidikan pada pemilih. Mendidik masyarakat tentang relevansi pilkada pada kepentingan masyarakat. Serta mendiskusikan, apa dan bagaimana pentingnya Pilkada langsung bagi masyarakat. Dengan demikian, media massa juga mengajak public untuk bersama-sama melakukan watching to the political process dalam Pilkada tersebut. (Henry 2012 : 171)

Dari uraian teori di atas pada dasarnya dapat diambil sebuah rangkuman bahwa ada dua faktor utama yang mendorong orang untuk melakukan partisipasi politik. Pertama, faktor internal yang berkaitan dengan status sosial seseorang seperti pendidikan, pendapatan dan pekerjaan. Kedua, faktor eksternal antara lain peluang resmi, rangsangan politik yang datang dari lingkungan.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode statistic deskriptif, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data- data numeric (angka), dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

2. Populasi dan sampel

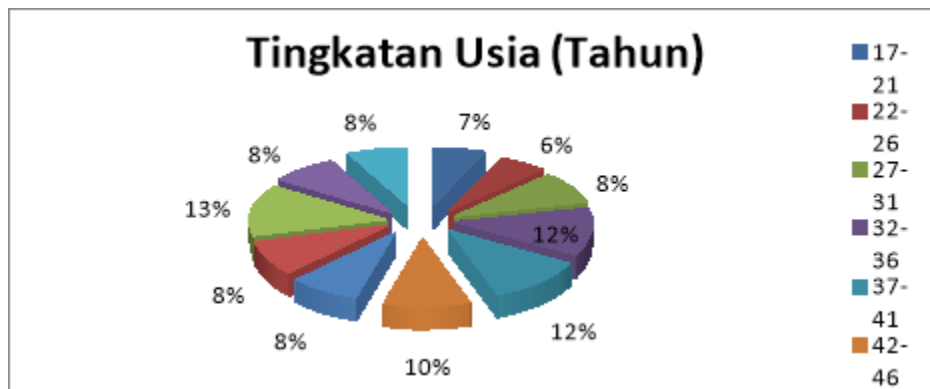
Populasi adalah keseluruhan obyek yang diteliti dan terdiri atas sejumlah individu, baik yang terbatas maupun tidak terbatas (Sumarni,et al.,2006 : 69). Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih nya di Kelurahan Tanjungpinang Kota yaitu berjumlah 3312 pemilih . Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik sampling probabilitas yaitu cara pengambilan sampel berdasarkan probabilitas atau peluang, dimana cara pengambilannya dilakukan secara acak (random), artinya semua objek atau elemen populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel (Iqbal Hasan.,2002 : 64) sehingga didapatkan sampel dengan tingkat kesalahan 10% yaitu 97 responden.

PEMBAHASAN

1. Identitas Responden

a. Usia

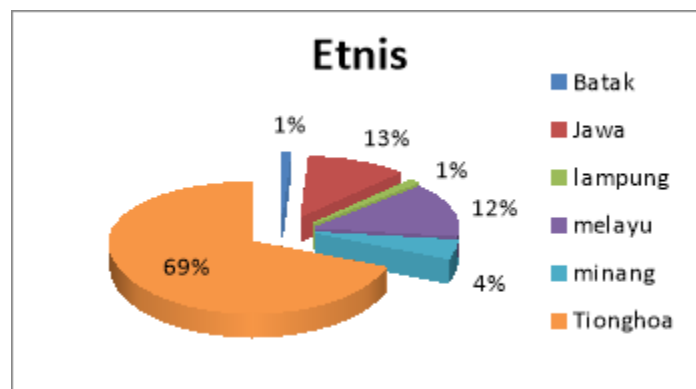
Gambar 1. Tingkatan Usia (Tahun)



Adapun dari 97 responden, paling banyak responden berusia 57-61 yaitu sebesar 13%, usia 32-36 yaitu 12%, usia 37-41 yaitu 12%, usia 42-46 yaitu 10%, usia 27-31 yaitu 8 %, usia 47-51 yaitu 8%, usia 52-56 yaitu 8%, usia 62-66 yaitu 8%, usia 67-71 yaitu 8%, usia 17-21 yaitu 7%, dan yang paling sedikit adalah usia 22-26 yaitu sebesar 6%.

b. Suku

Gambar 2. Etnis

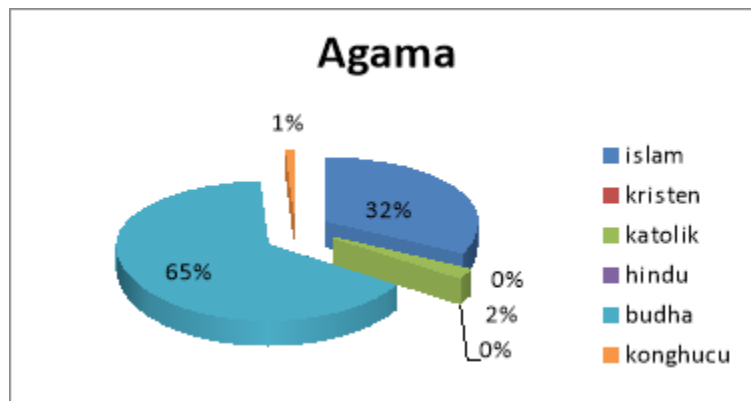


Adapun dari 97 responden, paling banyak adalah suku tionghoa sebesar 69%, suku Jawa sebesar 13%, suku melayu sebesar 12 %, suku minang sebesar 4%,

dan yang paling sedikit adalah suku batak dan suku lampung masing-masing sebesar 1%.

c. Agama

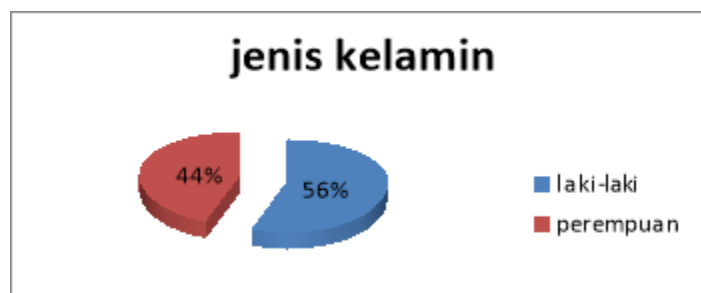
Gambar 3. Agama



Adapun dari 97 responden, agama yang paling banyak dianut oleh responden adalah agama budha sebesar 65%, agama islam sebesar 32%, agama konghucu 1%, katolik 2% dan terakhir Kristen dan hindu 0%.

d. Jenis Kelamin

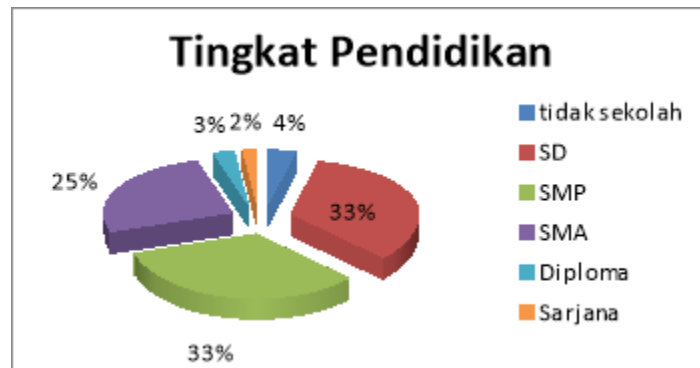
Gambar 4. Jenis Kelamin



Adapun dari 97 responden terdiri dari 56% responden berjenis kelamin laki-laki dan 44% responden berjenis kelamin perempuan.

e. Pendidikan

Gambar 5. Tingkat Pendidikan



Adapun dari 97 responden tingkat pendidikan tertinggi responden adalah SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah menengah pertama) masing-masing berjumlah 33 %, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) berjumlah 25%, tingkat diploma berjumlah 3 %, tingkat sarjana berjumlah 2%, dan tidak bersekolah berjumlah 4%.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat kelurahan tanjungpinang kota dalam pemilihan gubernur provinsi kepulauan riau tahun 2015

a. Visi dan misi masing-masing pasangan calon gubernur

Gambar 6. Visi dan misi masing-masing pasangan calon gubernur



Adapun yang bertarung dalam pemilihan gubernur provinsi kepulauan riau tahun 2015 terdiri dari dua pasangan calon yaitu pasangan calon gubernur

provinsi kepulauan riau dengan nomor urut 1. H.M.Sani- Nurdin Basiru (SANUR) dan pasang calon gubernur kepulauan riau dengan nomor urut 2. M.Soerya Respationo dan Ansar Ahmad (SAH).

Adapun visi dan misi dari pasangan SANUR terdiri dari **visi “ Bersatu mewujudkan kepulauan riau sebagai bunda tanah melayu yang sejahtera, berakhlak mulia, ramah lingkungan dan unggul di bidang maritim”**. sedangkan misi dari pasangan ini yaitu :

- 1 Meneruskan perkembangan perekonomian berbasis industry dan perdagangan di kawasan free trade zone (FTZ),
- 2 Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis kemaritiman dan pertanian
- 3 Meneruskan peningkatan daya saing ekonomi provinsi kepri dengan menyediakan infrastruktur yang berkualitas dan merata disetiap kabupaten/kota,
- 4 Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi), baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDM),
- 5 Mengembangkan sumber daya manusia (tenaga kerja local) yang terampil dan sejahtera,
- 6 Mengembangkan sector usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah, seperti kelompok usaha bersama (KUBE), usaha ekonomi produktif (UEP) masyarakat atau home industry,
- 7 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS),
- 8 Memelihara daya dukung dan daya kualitas lingkungan, agar pembangunan ekonomi berlangsung secara berkelanjutan (pembangunan yang ramah lingkungan)

- 9 Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, tertib, rukun dan aman dibawah payung budaya melayu,
- 10 Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, etos kerja yang tinggi, disiplin dan birokrasi yang melayani dengan ramah dan cepat berbasis SPM.

Sedangkan visi dan misi pasangan SAH terdiri dari Visi “ **Kepulauan riau yang aman, sejahtera, modern, berakhlak dan berbudaya berlandaskan asas kebersamaan dan gotong royong**” sedangkan misi dari pasangan ini terdiri dari :

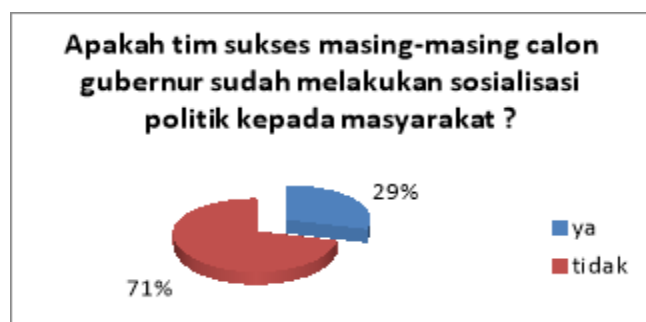
1. Menciptakan kondisi yang aman dengan mengikutsertakan partisipasi seluruh masyarakat kepulauan riau yang heterogen dan berada di wilayah terluar NKRI.
2. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang bertumpu pada kemandirian usaha, pemberdayaan bidang kelautan/kemaritiman.
3. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan yang bersih, modern, dan berorientasi kepada pelayanan public untuk mendukung kepulauan riau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
4. Memperkuat bidang pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusai (SDM) yang berkompentensi tinggi dan berakhlak mulia serta adanya perlindungan terhadap ibu dan anak,
5. Pembangunan wilayah hinterland serta pelestarian social budaya masyarakat, khususnya budaya melayu dengan prinsip “Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung”,
6. Mewujudkan supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan ketertiban umum yang didukung oleh system hukum,

7. Menumbuhkembangkan sikap kebersamaan dalam masyarakat melalui pengembangan semangat gotong royong sebagai nilai luhur bangsa Indonesia.

Visi adalah merupakan gambaran dan tujuan dari calon atau kandidat sedangkan misi adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan visi dan misi yang dimiliki oleh masing-masing pasangan calon tersebut ternyata hanya 7% dari total 97 responden yang menjawab bahwa visi dan misi dari pasangan calon tersebut mempengaruhi mereka untuk tidak menggunakan hak pilih mereka sedangkan 93% dari total 97 responden menjawab bahwa visi dan misi yang disampaikan oleh pasangan calon tersebut tidak mempengaruhi mereka untuk tidak menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan gubernur kepulauan riau tahun 2015. Hal ini dikarenakan menurut mereka visi dan misi yang disampaikan oleh kandidat pasangan calon kepala daerah tersebut sering tidak sesuai atau tidak dilakukan apabila pasangan tersebut sudah sah sebagai pasangan yang terpilih. Sehingga mereka sama sekali tidak tertarik untuk melihat, menonton atau sekedar membaca dimedia cetak tentang penyampaian visi dan misi dari pasangan calon gubernur tersebut. Ditambah lagi dengan ketidajelasan visi dan misi tersebut, visi dan misi tidak diejawantahkan dengan jelas sehingga sulit dimengerti oleh mereka.

b. Sosialisasi politik oleh masing-masing tim sukses.

Gambar 7. Sosialisasi politik oleh masing-masing tim sukses



Mendekati pemilihan dilaksanakan masing-masing tim sukses dari pasangan calon gubernur mulai mengadakan sosialisasi politik ke daerah-daerah pemilihan termasuk salah satunya turun ke daerah pemilihan yang berada dikelurahan tanjungpinang kota. Dari 97 responden 29% menjawab bahwa tim sukses masing-masing pasangan calon sudah mensosialisasikan atau mengkampanyekan pasangan masing-masing di daerah mereka dan 71% menjawab tidak ada tim sukses dari masing-masing pasangan calon yang mengadakan sosialisasi politik ke daerah mereka. Hal ini disebabkan karena masyarakat kelurahan tanjungpinang kota adalah masyarakat yang tertutup dengan pihak luar terlebih lagi jika sosialisasi atau kampanye tersebut berbentuk pertemuan formal maka dapat dipastikan mereka akan tidak menghadiri pertemuan tersebut ditambah lagi factor bahwa masyarakat dikelurahan tanjungpinang kota adalah mayoritas masyarakat Tionghoa yang tidak fasih dalam berbahasa Indonesia sehingga yang masih belum mengerti dengan apa yang disampaikan oleh tim sukses dari pasangan calon tersebut. Sehingga ketidakhadiran tim sukses dari pasangan calon tersebut di daerah mereka ikut mempengaruhi partisipasi mereka untuk tidak menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan gubernur kepulauan riau tahun 2015 yang lalu. Harapannya adalah bukan tim sukses yang turun untuk bersosialisasi namun harapan mereka adalah sosok dari pemimpin yang akan bertarung dalam pemilihan umum kepala daerahlah yang turun menemui mereka sehingga mereka mengenal sosok yang mereka pilih dan kedekatan terjalin, namun sayangnya para pasangan calon hanya datang pada acara-acara persatuan tionghoa seperti acara HAKKA yaitu acara yang diselenggarakan oleh salah satu ikatan marga tionghoa yang ada dikota tanjungpinang dimana dalam acara tersebut tidak semua warga bisa berpartisipasi dan tidak semua warga bisa langsung menyampaikan keluhan-keluhan yang selama ini mereka hadapi.

c. Isu ekonomi yang diangkat oleh partai politik pengusung calon

Gambar 8. Isu Ekonomi yang diangkat oleh partai politik pengusung calon



Walaupun masyarakat kelurahan tanjungpinang kota adalah masyarakat yang identik dengan hal-hal yang berbau ekonomi yaitu perdagangan ternyata isu ekonomi yang diangkat oleh pasangan calon gubernur tersebut tidak mempengaruhi mereka untuk mau menggunakan hak pilih mereka. Hal ini dapat dilihat dari 97 responden 91% mengatakan bahwa isu ekonomi tersebut tidak mempengaruhi mereka untuk tidak menggunakan hak pilih mereka dan 9% dari jumlah 97 responden menjawab mempengaruhi mereka untuk tidak menggunakan hak pilih mereka. Hal ini disebabkan oleh bahwa menurut mereka isu-isu ekonomi yang sering dijadikan jargon oleh pasangan calon atau pun partai yang mengusung agar masyarakat dikelurahan tanjungpinang kota tertarik sering tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, belum ada kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya yang memihak kepada mereka sehingga seperti apapun bentuk kebijakan ekonomi yang akan dikeluarkan oleh pasangan calon apabila mereka terpilih bukanlah sesuatu hal yang dipertimbangkan oleh mereka untuk tidak ikut dalam pemilihan kepala daerah gubernur provinsi kepulauan riau tahun 2015 lalu.

d. Dorongan Keluarga

Gambar 9. Dorongan Keluarga



Keluarga adalah merupakan pihak yang paling dekat dengan si pemilih, keluarga sering dianggap adalah pihak yang paling mempengaruhi pilihan seseorang dan partisipasi seseorang dalam sebuah pemilihan. Namun dari hasil penelitian didapatkan 76% dari 97 responden menjawab bahwa dorongan keluarga tidak mempengaruhi mereka untuk tidak menggunakan hak pilih mereka dan 24% mengatakan bahwa dorongan keluarga mempengaruhi mereka untuk tidak menggunakan hak pilih mereka. Artinya bahwa tingkat golput yang tinggi masyarakat kelurahan tanjungpinang kota pada pemilihan umum kepala daerah yang lalu bukan disebabkan atau dipengaruhi oleh keluarga. Menurut hemat peneliti orang yang bisa mempengaruhi orang untuk tidak ikut memilih adalah tentunya orang yang mengerti tentang proses politik itu sendiri, mengapa kita harus memilih dan apa yang terjadi jika kita tidak memilih. Namun, jika kita melihat pemahaman politik masyarakat kelurahan tanjungpinang kota yang rendah maka menurut peneliti jika keluarga tidak mempengaruhi mereka untuk tidak ikut memilih dalam pemilihan gubernur tahun 2015 yang lalu adalah merupakan hal yang wajar.

e. Perkembangan politik di media cetak dan elektronik

Gambar 10. Perkembangan politik di media cetak dan elektronik



Saat sekarang ini umumnya media massa memiliki berbagai fungsi bagi khalayaknya salah satunya adalah sebagai pemberi informasi. Dalam hal kampanye, media massa baik cetak maupun elektronik merupakan sebuah saluran kampanye terhadap konstituen. Apalagi dengan arus teknologi ini, rasanya media elektronik menjadi saluran utama bagi jalan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat khususnya dalam masa kampanye pemilu. Medium ini telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Hal itu salah satunya disebabkan sudah banyaknya masyarakat yang memiliki televisi maupun radio, bahkan sebagian lagi sudah mampu menggunakan sarana atau saluran kampanye melalui media elektronik khususnya televisi. Banyak sedikitnya penayangan yang berhubungan dengan transformasi ataupun sosialisasi visi dan misi dari sebuah partai maupun calon yang dijagokannya akan sangat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadapnya. Dari 97 reponden 70% menjawab bahwa mereka tidak mengikuti perkembangan politik yang ada di media cetak maupun elektronik, dan 30% dari 97 responden menjawab bahwa mereka mengikuti perkembangan politik yang ada di media cetak maupun elektronik. Hal ini dikarenakan bahwa apa yang ditampilkan pada media cetak maupun elektronik adalah lebih banyak berkaitan dengan hal-hal berbau negatif tentang politik

seperti pejabat yang korupsi dari pada yang positif sehingga mereka langsung menyamakan semua hal yang berkaitan dengan politik itu tidak bagus dan tidak ada untungnya bagi mereka.

f. Kesadaran Politik

Gambar 11. Kesadaran Politik



Kesadaran politik adalah merupakan kesadaran yang dimiliki oleh pemilih untuk menggunakan hak pilihnya tanpa ada paksaan dari siapapun. Dari 97 reponden 35 % menjawab tidak memiliki kesadaran politik dalam pemilihan gubernur tahun 2015 dan 65% menjawab bahwa mereka memiliki kesadaran politik dalam pemilihan gubernur tahun 2015. Seharusnya dengan tingkat kesadaran politik yang cukup tinggi seharusnya tingkat partisipasi politik mereka dalam pemilihan gubernur kepulauan riau tahun 2015 yang lalu lebih banyak jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya namun ternyata tidak, lebih tinggi angka golput dari pada yang memilih. Peneliti melihat bahwa mereka menyadari bahwa mereka harus memilih untuk sebuah perubahan namun mereka sudah tidak memiliki kepercayaan kepada pemerintah. Sehingga mereka merasa bahwa apabila mereka menggunakan hak pilih mereka tetap tidak akan ada perubahan untuk mereka. Ini adalah bentuk akumulasi dari pemimpin-pemimpin sebelumnya yang belum berhasil untuk menumbuhkan rasa kepercayaan mereka sehingga imbasnya walaupun

mereka sadar akan kewajibannya dalam politik namun mereka tidak menggunakannya.

g. Kepercayaan Kepada Pemerintah

Gambar 12. Kepercayaan Kepada Pemerintah



Dari 97 responden 42% menjawab "ya" bahwa mereka memiliki kepercayaan kepada pemerintah sedangkan 58% menjawab "tidak" memiliki kepercayaan kepada pemerintah. Hal ini disebabkan karena pemerintah jarang mengeluarkan kebijakan yang memihak kepada mereka bahkan banyak kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan ditempat mereka malah memberikan dampak yang negatif bagi mereka seperti contohnya kebijakan tentang system parkir yang menurut mereka kebijakan tersebut bukannya mengurangi macet tetapi malah mengakibatkan kemacetan bertambah parah, atau kebijakan lainnya seperti system tutup jalan yang sering sekali dilakukan pemerintah akibat banyaknya acara yang dilakukan digedung daerah sehingga mereka kesulitan apabila ingin kembali kerumah akibat semua jalan ditutup dan tidak ada akses jalan lain menuju kerumah mereka dimana masyarakat kelurahan tanjungpinang kota ini adalah masyarakat yang banyak tinggal di daerah tepi laut dan pasar. Akibat kebijakan-kebijakan yang tidak memihak tersebut membuat mereka tidak percaya dengan pemerintah sehingga mempengaruhi mereka untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

h. Keikutsertaan dalam pemilihan legislatif tahun 2014

Gambar 13. Keikutsertaan dalam pemilihan legislative tahun 2014



Dari 97 responden 52% menjawab ikut memilih dalam pemilu legislatif di tahun 2014 yang lalu dan 48% responden menjawab tidak ikut memilih dalam pemilu legislatif di tahun 2014 lalu. Lebih tingginya angka memilih pada pemilu legislative di tahun 2014 lalu adalah merupakan hal yang menarik untuk dianalisa mengingat pada pemilihan sebelumnya angka partisipasi mereka dalam pemilihan presiden dan kepala daerah angka partisipasi mereka rendah. Hal ini disebabkan oleh pengaruh dari kandidat yang mengikuti pemilihan tersebut adalah kandidat yang berasal dari etnis mereka yaitu etnis tionghoa, sedangkan pada pemilihan umum lainnya tidak ada calon atau kandidat yang berasal dari etnis tionghoa.

Pada pemilu legislaif inilah mereka benar-benar antusias untuk memilih karena menurut mereka apabila calon dari mereka bisa duduk di dalam system pemerintahan maka urusan-urusan yang selama ini sulit mereka tuntaskan akan menjadi mudah dengan adanya perwakilan mereka di dalam system. Bahkan fenomena yang terjadi walaupun ada pihak kelurahan yang seharusnya menjadi tempat mereka mengadu namun tidak mereka pergunakan mereka lebih memilih untuk mengadu kepada anggota legislative dari mereka dari pada dengan pihak kelurahan setempat.

i. Lokasi tempat pemungutan suara

Gambar 14. Lokasi tempat pemungutan suara



Tempat pemungutan suara adalah tempat yang digunakan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Umumnya tempat pemungutan suara tidak jauh dari tempat tinggal warga yang menggunakan hak pilih, namun terkadang faktor psikologis pemilih dapat mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan haknya untuk memilih namun untuk masyarakat di kelurahan tanjungpinang kota letak tempat pemungutan suaran tidak mempengaruhi mereka untuk tidak ikut dalam memilih. Dari 97 responden 84% menjawab bahwa lokasi tempat pemungutan suara tidak mempengaruhi mereka untuk berpartisipasi atau menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan gubernur kepulauan riau tahun 2015 sedangkan 16% menjawab bahwa lokasi tempat pemungutan suara mempengaruhi mereka untuk berpartisipasi atau menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan gubernur kepulauan riau tahun 2015.

j. Faktor Cuaca

Gambar 15. Faktor cuaca



Dari 97 responden 77% menjawab bahwa factor cuaca tidak mempengaruhi mereka untuk tidak ikut dalam memilih di PILKADA gubernur kepulauan riau tahun 2015 sedangkan 23% menjawab bahwa factor cuaca mempengaruhi mereka untuk tidak ikut dalam memilih di PILKADA gubernur kepulauan riau tahun 2015. Hal ini sekaligus membantah pendapat dari pihak pemerintah bahwa angka golput tinggi adalah diakibatkan karena pada saat pemilihan cuaca hujan yang berlangsung dari pagi sampai sore hari dimana batas untuk menggunakan hak pilih adalah dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 13.00 wib siang. Dari hasil diatas katakan bahwa mereka tidak menggunakan hak pilihnya bukan karena factor cuaca.

k. Kartu Undangan memilih

Gambar 16. Kartu Undangan Memilih



Kartu undangan memilih adalah merupakan kartu undangan yang harus dibawa pemilih untuk bisa menggunakan hak pilihnya, dimana yang mendapatkan kartu undangan memilih ini adalah orang yang sudah terdaftar di daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum. Dari 97 responden 83% menjawab mendapatkan kartu undangan untuk ikut memilih dalam pemilihan gubernur kepulauan riau tahun 2015 sedangkan 17% menjawab tidak mendapatkan kartu undangan untuk ikut memilih dalam pemilihan gubernur kepulauan riau tahun 2015. Dari persentase diatas kita dapat melihat bahwa kinerja dari KPU sudah cukup baik dimana dapat dilihat bahwa hampir semua masyarakat yang terdaftar sudah mendapatkan kartu undangan untuk memilih. Namun, fenomena yang terjadi kartu undangan sudah didapatkan namun angka golput juga tinggi, hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang masih terdaftar di DPT namun sudah tidak tinggal di kelurahan tersebut karena mereka malas untuk mengurus kepindahan akibat jarak kantor kecamatan yang jauh dimana mereka harus naik akomodasi laut dan surat pindah belum tentu bisa selesai dalam 1 hari.

I. Pemilihan walikota tanjungpinang tahun 2012

Gambar 17. Pemilihan walikota tanjungpinang tahun 2012



Pemilihan walikota tahun 2012 lalu adalah pemilihan walikota yang memiliki nuansa yang berbeda karena kandidat calon yang maju adalah kandidat-kandidat baru yang belum dikenal oleh masyarakat tanjungpinang. Dari 97 responden 37% menjawab bahwa mereka ikut memilih dalam pemilihan walikota Tanjungpinang tahun 2012 yang lalu dan 63% responden menjawab tidak ikut memilih dalam pemilihan walikota tanjungpinang tahun 2012 yang lalu. Hal ini disebabkan karena selain sosok yang mencalonkan dalam pilkada tersebut belum dikenal juga disebabkan karena factor kultur dari masyarakat kelurahan tanjungpinang kota tersebut dimana apabila mereka sudah merasa nyaman dengan pemerintahan yang ada maka cenderung pemerintahan tersebut dipertahankan oleh mereka namun karena system politik kita tidak membolehkan hal itu maka mereka diwajibkan untuk memilih calon-calon baru yang mana menurut mereka belum bisa dilihat kinerjanya sehingga berimbas pada kehadiran mereka di dalam pilkada tersebut.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa partisipasi politik masyarakat di kelurahan tanjungpinang kota dalam pemilihan gubernur tahun 2015 lalu adalah partisipasi politik mereka rendah. Adapun dipengaruhi oleh factor-faktor sebagai berikut yaitu pertama, faktor kepercayaan kepada pemerintah dimana 58% menjawab bahwa mereka tidak percaya kepada pemerintah dan 42% menjawab percaya kepada pemerintah. Kedua, factor sosok dari kandidat yang ikut dalam pemilihan juga mempengaruhi keikutsertaan mereka dalam memilih yaitu sosok atau kandidat yang merupakan dari etnis tionghoa yang merupakan etnis terbesar di kelurahan tanjungpinang kota, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden dimana pada pemilihan legislatif tahun 2014 tahun lalu angka partisipasi mereka lebih besar dari pada yang tidak memilih yaitu 48% tidak memilih 52% memilih sedangkan

pada pemilihan walikota tahun 2012 lalu dimana dalam pemilihan tersebut tidak ada kandidat yang berasal dari etnis mereka maka tingkat partisipasinya rendah yaitu 63% tidak memilih dan 37% memilih. ketiga adalah factor sosialisasi yang kurang yaitu 71% responden menjawab tidak ada sosialisasi di daerah pemilihan mereka 29% menjawab sosialisasi sudah dilakukan di daerah pemilihan mereka dan factor tidak mengikuti perkembangan politik di media cetak maupun elektronik mempengaruhi mereka untuk tidak menggunakan hak pilihnya yaitu dapat dilihat dari persentase 70% dari mereka tidak mengikuti perkembangan politik di media cetak dan elektronik sedangkan 30% menjawab mereka mengikuti perkembangan politik di media cetak dan elektronik. Sedangkan factor lainnya seperti factor kesadaran politik, isu ekonomi, dorongan keluarga, visi dan misi calon kandidat, lokasi tempat pemungutan suara, cuaca serta kartu undangan tidak mempengaruhi keikutsertaan mereka untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan gubernur provinsi kepulauan riau tahun 2015.

SARAN

Adapun saran dari peneliti adalah sebaiknya sosialisasi tidak diselenggarakan dengan situasi yang formal mengingat masyarakat dikelurahan tanjungpinang kota adalah masyarakat tidak terbiasa dengan situasi formal ditambah lagi hal-hal tersebut tidak menguntungkan bagi mereka selain itu sebaiknya pada saat sosialisasi juga disediakan penterjemah karena masih banyak masyarakat kelurahan tanjungpinang kota yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Pendekatan-pendekatan persuasif perlu pemerintah lakukan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memihak sehingga kepercayaan kepada pemerintah dapat bertambah dan berdampak pada peningkatan partisipasi mereka dalam pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Rahman H.I,2007, Sistem Politik Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Henry Subiakto dan Rachmah Ida, 2012, Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi, Kencana, Jakarta.
- Husein Umar, 2007, Metode Penelitian Skripsi dan Bisnis,PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta Iqbal Hasan, 2002, Metode Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Murti Sumarni dan Salamah wahyuni, 2006, Metodologi Penelitian Bisnis, Andi, Yogyakarta Ramlan Surbakti, 2007, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama,Jakarta
- Samuel P.Huntington dan Joan Nelson, 1990, Partisipasi Politik di negara berkembang, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tim Peneliti Perludem, 2011, Menata Kembali Pengaturan Pemilukada, Perludem, Jakarta.

Jurnal

- Bismar Arianto,2011, Analisis Penyebab Masyarakat tidak memilih dalam Pemilu, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol.1 No.1
- Lili Romli, 2005, Pilkada Langsung, Otonomi daerah dan Demokrasi Lokal, Analisis CSIS, Vol.34 No.3
- Notrida Mandica, 2007, Desentralisasi, Partisipasi Politik dan Demokrasi Lokal, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 24
- Tommy A Legoeo, 2005, Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, Good Governance dan Masa depan otonomi daerah, Jurnal Desentralisasi, Vol.6 No. 4

Media Cetak

Harian Kompas tanggal 14 Maret 2015

Media Internet

www.kpu.go.id

Draft Ringkasan Eksekutif

Institute, 2015, Pemilu Nasional Serentak 2019, LIPI, Jakarta

Perundang-undangan:

Undang-undang No.8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang.

PKPU No.1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

PKPU No.2 Tahun 2015 Tentang Tahapan,Program,Jadwal dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

PKPU No.4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.